

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, karena memiliki sekitar 17.506 pulau yang tersebar dari sabang hingga merauke. (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2023). Meskipun 65% wilayahnya adalah lautan, Indonesia mengalami tantangan yang cukup rumit. Indonesia memiliki akses luas ke air laut namun air bersih yang dapat dikonsumsi sangat terbatas, karena air laut sendiri memerlukan proses desalinisasi yang mahal untuk diubah menjadi air layak konsumsi. (Mardiansyah, 2024).

Air menjadi salah satu sumber daya yang paling penting bagi keberlangsungan hidup semua makhluk. Manusia memerlukan air bersih untuk berbagai aktivitas sehari-hari seperti memasak, mencuci dan banyak hal lainnya, Tidak hanya itu air juga penting untuk keperluan di berbagai bidang seperti perkebunan, industri, pariwisata dan lain-lain. Oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatannya perlu diperhatikan dengan baik (Sofyan et al., 2023).

Ketersediaan air bersih tidak hanya menjadi hak asasi, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap warganya dapat mengakses air bersih secara layak, aman dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, termasuk akses terhadap air bersih. (Wahyuni, 2024).

Batam merupakan kota terbesar di provinsi Kepulauan Riau, wilayah Batam mencakup Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di sekitar Selat Singapura dan Selat Malaka. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, jumlah penduduk di kota ini pada akhir tahun 2023 mencapai 1.260.785 jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Batam Tahun 2024

Jenis Kelamin	Proyeksi Penduduk kota Batam Menurut Jenis Kelamin (ribu jiwa) 2024
Laki-laki	645,59
Perempuan	631,34
Jumlah	1.276,93

Sumber: BPS Kota Batam, 2024.

Pada tabel diatas tahun 2024 jumlah penduduk dikota Batam mengalami kenaikan sekitar 10.000 jiwa dengan total penduduk mencapai 1.276,93 jiwa. Dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Batam dan akan terus menaik setiap tahunnya, Pemerintah harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga pengelolaan dan penyediaan air bersih yang merata. Terutama wilayah-wilayah yang mengalami krisis air bersih seperti Batam Centre, Batu Aji, dan Bengkong serta wilayah *hinterland* yang jauh dari pusat kota dan hanya bergantung pada air hujan ataupun air sumur untuk kebutuhan harian.

Kota Batam tidak memiliki sumber mata air dari tanah. Sumber air di kota Batam hanya mengandalkan waduk buatan sebagai penyuplaian air baku . Waduk-waduk ini mengumpulkan air hujan yang kemudian digunakan sebagai air baku. Air hujan yang turun nanti akan masuk ke drainase dan kemudian ditangkap di daerah tangkapan air dan masuk ke dalam DAM yang tersebar di Kota Batam. Adapun beberapa waduk yang tersebar di beberapa kecamatan Kota Batam seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1. 1 Suplai air Bersih Batam 2024



Sumber: [bpbatam.go.id](http://bpbatam.go.id), 2024.

Dengan menyebarnya waduk di berbagai wilayah Kota Batam, pemerintah Kota Batam harus memastikan pengelolaan air bersih berjalan dengan baik karena ditengah pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang sangat pesat keperluan pasokan air bersih juga akan meningkat. Penyebaran air di daerah kepulauan juga sering kali

tidak merata. Jika penyediaan air bersih tidak dikelola secara optimal, hal ini dapat menyebabkan masalah serius akibat terbatasnya pasokan air (Fathoni,2024).

Wilayah *hinterland* merupakan wilayah yang paling pinggir atau terletak di pedalaman yang jauh dari kota (Ananda et al., 2023). Beberapa wilayah *hinterland* di kota Batam menghadapi kesulitan dalam memperoleh air baku, sehingga penduduk di daerah tersebut bergantung pada air hujan dan air sumur untuk kebutuhan harian. Dalam mengatur pengelolaan pendistribusian air bersih di wilayah *hinterland*, Peraturan Walikota Batam No. 47 tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD-UPTD) Pengelolaan Air Bersih Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kota Batam bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan air bersih seluruh wilayah *hinterland* dan wilayah sekitarnya.

UPT PAB Kota Batam terus berusaha meningkatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah *hinterland*. Sampai tahun 2023, telah terpasang 7.644 sambungan ke rumah-rumah warga dengan kapasitas total mencapai 73 liter per detik. (Nurahman, 2024).

Tabel 1.2 Data Layanan UPT PAB Kota Batam 2023

Cakupan Wilayah Pulau	48 Pulau
Cakupan Wilayah Kecamatan	5 Kecamatan
Cakupan Wilayah Kelurahan	20 Kelurahan
Jumlah Water Treatment Plant	26 WTP
Sea Water Reverse Osmosis	2 SWRO

Sumber: Satudata.batam.go.id, 2024.

Pada tahun 2023, cakupan wilayah pelayanan air bersih di wilayah *Hinterland* telah mencapai 26 instalasi pengolahan air (*Water Treatment Plant/WTP*), 2 Instalasi Kota Kecil (IKK), dan 2 fasilitas *Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)* yang tersebar di lima kecamatan. Penyediaan layanan ini mencakup sumber air yang bervariasi, termasuk waduk tadah hujan, mata air, dan pengolahan air laut, sehingga menjangkau pulau-pulau yang tersebar di wilayah *Hinterland*.

#### 1. *Water Treatment Plant (WTP)*

Instalasi WTP memanfaatkan sumber air dari waduk tadah hujan atau mata air untuk mengolah air baku menjadi air bersih. Hingga saat ini, layanan WTP telah tersedia di sejumlah pulau, di antaranya: Pulau Belakang Padang, Bulang, Pemping, Sembulang, Pulau Abang, Pulau Mecan, Pulau Air Raja, Pulau Terong, Pulau Setokok, Pulau Kasu, Pulau Pecong, Subang Mas, Pulau Geranting, Rempang Cate, Pulau Ngenang, Pulau Jaloh, Pulau Bertam, Temoyong, Tanjung Banon, Pulau Petong, Kampung Baru, Labu, Pulau Air, Galang Baru, Pulau Selat Nenek, Pulau Nguan, dan Pulau Seraya.

## 2. Instalasi Kota Kecil (IKK)

IKK menyediakan layanan air bersih yang bersumber dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam. Beberapa wilayah pelayanan IKK meliputi: Pulau Buluh, Pulau Lance, Tiangwangkang, Pulau Akar, Pulau Panjang, dan Tanjung Gundap.

## 3. *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO)

SWRO adalah teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pulau-pulau yang tidak memiliki sumber air baku. Fasilitas SWRO telah dioperasikan di: Belakang Padang dan Pulau Labu.

Ketersediaan air bersih menjadi indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan geografis seperti Kota Batam. Sebagai kota industri yang terus berkembang, Batam menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk yang terus bertambah. Namun, tidak semua wilayah hinterland memiliki sumber air baku yang memadai untuk diolah menjadi air bersih. Kondisi geografis, struktur tanah, serta keterbatasan sumber daya air menjadi kendala utama dalam penyediaan air bersih.

Salah satu wilayah yang masih menghadapi krisis air bersih adalah Tanjung Melagan. Tanjung Melagan merupakan sebuah wilayah yang terletak di Jembatan 6 kelurahan Galang Baru, Kecamatan Galang, kota Batam. Wilayah ini berada di area hinterland Kota Batam, yaitu wilayah pedalaman yang jauh dari pusat kota. Secara geografis pulau ini dihuni oleh sekitar 60 kepala keluarga yang mayoritas

menggantungkan hidup mereka sebagai nelayan. Topografi pulau Tanjung Melagan yang berbatasan langsung dengan laut memberikan tantangan tersendiri dalam penyediaan air bersih.

Wilayah ini belum memiliki akses air bersih yang memadai. Krisis air bersih di wilayah ini telah berlangsung lama dipulau ini. Berdasarkan keterangan warga, sejak pulau ini dihuni secara tetap pada tahun 1985 hingga tahun 2024, belum pernah ada pembangunan sistem penyediaan air bersih permanen oleh pemerintah, baik berupa jaringan perpipaan, instalasi pengolahan air bersih maupun distribusi air terpusat. Selama puluhan tahun, masyarakat hanya mengandalkan sumber air tradisional berupa sumur tua peninggalan nenek moyang yang menjadi salah satu sumber utama bagi penduduk setempat. Namun fasilitas sumur ini memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Sumur ini tidak terintegrasi dengan sistem distribusi air yang mampu mengalir langsung kesetiap rumah warga. Penduduk harus datang langsung ke lokasi sumur, mengambil air secara manual menggunakan ember atau wadah lainnya secara bergantian. Kualitas air dari sumur seringkali tidak layak konsumsi karena bercampur dengan air laut, terutama saat air pasang (BAZNAS Kota Batam, 2024).

Ketika musim kemarau tiba kapasitas sumur semakin terbatas untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga Tanjung Melagan terpaksa membeli air dari pulau seberang dengan biaya tinggi, yang menjadi beban ekonomi tersendiri. Proses pembelian air ini juga mengharuskan mereka menyeberangi laut, menghadapi risiko perjalanan yang sulit. Akses ke pulau Tanjung Melagan relatif sulit, terutama wilayah ini terpisah dari pulau utama Kota Batam. Transportasi utama yang

digunakan oleh penduduk adalah perahu atau kapal kecil, yang menghubungkan wilayah ini dengan pulau-pulau lain. Kondisi ini menambah kompleksitas distribusi air bersih dan kebutuhan logistik lainnya.

Permasalahan ini menunjukkan perlunya perhatian serius, Pemerintah Kota Batam memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasokan air bersih yang merata di seluruh wilayah, termasuk di wilayah *hinterland* seperti Tanjung Melagan. Dalam hal ini, kebijakan, program, dan kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Batam, termasuk pembangunan infrastruktur air bersih. Implementasi kebijakan ini masih mengalami berbagai kendala seperti tantangan biaya yang tinggi, kompleksitas instalasi, kurangnya perencanaan yang terintegrasi, serta minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan. Dan pada kenyataannya masyarakat di tanjung melagan masih kesulitan dalam mendapatkan air bersih.

Sebagai kota industri yang berkembang pesat, Batam menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan kebutuhan air bersih akibat pertumbuhan populasi dan kemampuan suplai yang ada. Ketidakseimbangan ini berdampak pada gangguan distribusi air bersih, terutama di wilayah *hinterland* dan pemukiman baru yang belum terintegrasi dengan jaringan distribusi (Yuliandra, n.d.). Tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan air bersih di wilayah *hinterland* menjadi sangat penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara merata.

Berdasarkan dari fenomena tersebut saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul terkait “TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI PULAU TANJUNG MELAGAN KOTA BATAM.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : **Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyediaan Air Bersih di Pulau Tanjung Melagan Kota Batam.**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Tanggung jawab Pemerintah Kota Batam dalam penyediaan air bersih di Pulau Tanjung Melagan serta mengkaji kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan tanggung jawab penyediaan air bersih di Pulau Tanjung Melagan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian lain yang serupa, khususnya yang membahas isu-isu terkait pengelolaan sumber daya air di wilayah kepulauan, serta mendukung pengembangan literatur terkait peran pemerintah dalam

mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan infrasturktur dasar bagi masyarakat terpencil.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **a. Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini memberi kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan air bersih, khususnya di wilayah Tanjung Melagan.

##### **b. Manfaat Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak mereka atas layanan air bersih yang memadai dan berkelanjutan.

##### **c. Manfaat Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi terhadap kebijakan pemerintah Kota Batam dalam penyediaan air bersih khususnya di wilayah hinterlang seperti Tanjung Melagan.

